

KABUPATEN PASAMAN BARAT



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2022

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridha-Nya maka Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 ini dapat tersusun.

Penyusunan Renja ini sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 serta Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini sebagai penjabaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dengan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan dokumen Renja ini serta besar harapan kami semoga Dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun rangkaian pekerjaan selanjutnya. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantukami sehingga tersusunnya Rancangan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.

Simpang Empat, Juli 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran



HENDRI WIJAYA, SH

NIP. 19711210 199203 1 001

DAFTAR ISI

	hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah...	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 32
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	32
3.3 Program dan Kegiatan	33
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 39
 BAB V PENUTUP	 48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat telah membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa setiap pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut diatas memberikan gambaran bahwa di era otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan untuk dapat mandiri dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

Untuk itu salah satu faktor pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan adalah terciptanya situasi yang kondusif pada suatu wilayah sesuai dengan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 Ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam Pasal 255 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan:

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 telah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat.

Selanjutnya untuk menjalankan organisasi pemerintahan diperlukan dokumen perencanaan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Sesuai dengan dinamika pembangunan perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Perencanaan Pembangunan nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni

perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Rencana Kerja (Renja) mempunyai kedudukan yang strategis dalam menjembatani perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan PD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 berisi dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pelayanan dasar untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat, yang dilaksanakan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode perubahan tahun anggaran 2022 yang bersifat teknis operasional dan kuantitatif.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 juga memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2022 sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang pelayanan dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Pada tahapan selanjutnya Renja Perubahan ini digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan OPD dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022. Kualitas dokumen Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan serta mengevaluasi rencana yang telah disusun.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
18. Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat;
21. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman barat Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016, Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat yaitu melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah yang bersifat Spesifik di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran berdasarkan asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Sedangkan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran adalah :

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Pemberian Dukungan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang 5

3. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
4. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan Fungsinya. Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi didukung oleh Sumber Daya Aparatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 dengan Struktur sebagai berikut :
 1. Unsur Pimpinan, yaitu : Kepala Satuan
 2. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu : Sekretaris yang terdiri dari 3 Sub. Bagian, yaitu:
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub. Bagian Program
 - c. Sub. Bagian Keuangan
 3. Unsur Pelaksana, yaitu :
 - I. Bidang Penegakan Perundang – Undangan yang terdiri dari :
 - a. Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 - b. Kasi Penyelidikan dan Penyidik
 - c. Kasi Sumber Daya Aparatur
 - II. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang terdiri dari :
 - a. Kasi Operasi dan Pengendalian
 - b. Kasi Kerja Sama
 - c. Kasi Inteligen
 - III. Bidang Pemadam Kebakaran yang terdiri dari :
 - a. Kasi Pemadam Kebakaran
 - b. Kasi Pencegahan Kebakaran
 - c. Kasi Sarana Prasarana
 - IV. Bidang Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari :
 - a. Kasi Bina Potensi Masyarakat.
 - b. Kasi Perlindungan Masyarakat.
 - c. Kasi Sarana Prasarana Linmas.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk

menyediakan dokumen perencanaan perubahan tahun anggaran 2022 yang memuat program dan kegiatan terukur dalam memberikan acuan dasar untuk penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagai perangkat yang menciptakan pelayanan dasar menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat yang sinkron dan terintegrasi pada Tahun 2022.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kualitas penegakan hukum, produk hukum, serta kecakapan penangnaaan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan meningkatkan penerapan pemerintah yang bersih, akuntabel, dan efisien.
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 *Latar Belakang*, menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD, pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.
- 1.3 *Maksud dan Tujuan*, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.
- 1.4 *Sistematika Penulisan*, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra* OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, capaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan OPD*, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD*, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.
- 2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.
- 2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi*, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2 *Tujuan dan sasaran Renja OPD*, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

- 3.3 *Program dan Kegiatan*, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Kerja, Program dan Kegiatan

BAB V : PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Melalui evaluasi akan diketahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 4 (empat) program yang terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran tahun 2021 memuat pencapaian target kinerja tahun 2020 dan tahun 2021 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran tahun 2020 dan tahun 2021. Selain itu, evaluasi pelaksanaan renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2022), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran pada tahun-tahun sebelumnya.

Terkait dengan hal tersebut rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan kebakaran Kabupaten Pasaman Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran selama tahun 2021 dan perkiraan maju 2022.

Evaluasi Program Tahun 2021 dengan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 7.298.369.060,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah) dengan Realisasi Anggaran pada Tahun 2021 sebesar Rp. 6.375.346.538,00

Untuk mengetahui pelaksanaan Renja Perubahan tahun 2022 maka dilakukan pengukuran dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat.

Hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2021 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (Tahun Anggaran 2022) disajikan pada Tabel T-C.29 di bawah ini :

Tabel 2.1.1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Pasaman Barat

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan						Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022							
																		Target Renja Tahun 2021				Realisasi Renja Tahun 2021						Tingkat Realisasi Tahun 2021 (%)				Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (%)	
1						2						3		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	10= (5+7+9)		11=10/9					
1						Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar													7.839.725.260		6.888.318.592		6.888.318.592		7.364.449.361		7.839.725.260	40							
1 05						Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat												7.839.725.260		6.888.318.592		6.888.318.592		7.364.449.361		7.839.725.260	40								
1	05	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota						Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		100%				12 bulan	7.049.663.660	100%	6.174.582.052	100%	6.174.582.052	100%	6.507.729.361	60%	12.682.311.413	42							
1	05	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase pemenuhan gaji, tunjangan dan honorarium ASN		100%				12 bulan	6.724.582.310	12 Bulan	5.588.982.477	12 Bulan	5.588.982.477	100%	5.925.637.311	44%	11.514.619.788	44							
1	05	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah PNS yang menerima Gaji dan Tunjangan		35 Orang				33 orang	3.524.402.310	33 orang	2.916.592.477	33 orang	2.916.592.477	35 Orang	3.642.197.311	62 Orang	6.558.789.788	82							
1	05	01	2	02	02	Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						Jumlah Non PNS (PTT/THL) Penunjang Adminitrasi Perkantoran		306 Orang				306 orang	3.037.600.000	306 orang	2.532.310.000	306 orang	2.532.310.000	306 Orang	2.157.500.000	643 Orang	4.689.810.000	77							
1	05	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan		12 Bulan				12 bulan	162.580.000	12 bulan	140.080.000	12 bulan	140.080.000	12 Bulan	125.940.000	18 Bulan	266.020.000	50							
1	05	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor		100%				100%		100%	94.812.700	100%	194.812.700	100%	210.989.200	67,5%	405.801.900	60							
1	05	01	2	06	01	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor		1 Paket										1 Paket	11.600.000	-	11.600.000	30							
1	05	01	2	06	02	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah ATK yang dibutuhkan		1 Paket				1 paket	63.351.150	1 paket	60.878.450	1 paket	60.878.450	1 Paket	45.626.700	1 paket	106.505.150	82							
1	05	01	2	06	03	Penyedia Peralatan Rumah Tangga						Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih		1 Paket										1 Paket	11.857.750	-	11.857.750	60							
1	05	01	2	06	05	Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah Blanko SPT, SPDP, Kuitansi dan map DPPKBPA yang dibutuhkan		1 Paket				1 paket	26.531.000	1 paket	25.724.750	1 paket	25.724.750	1 Paket	20.580.250	1 paket	46.305.000	24							

1	05	01	2	06	09	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah rapat koordinasi dari pemerintah provinsi dan pusat (K/L) yang diikuti2. Jumlah penyediaan makan/minum rapat koordinasi	1. 26 Kali2. 34 Kali				1. 26 Kali2. 34 Kali	113.584.000	1. 26 Kali2. 34 Kali	108.209.500	1. 26 Kali 2. 34 Kali	108.209.500	1. 26 Kali2. 34 Kali	121.324.500	1. 36 Kali2. 42 Kali	229.534.000	60
1	05	01	2	08		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100%				100%	82.798.350	100%	39.392.475	100%	39.392.475	100%	89.998.350	54%	129.390.825	8
1	05	01	2	08	02	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	12 Bulan				12 bulan	82.798.350	12 bulan	39.392.475	12 bulan	39.392.475	12 Bulan	89.998.350	18 Bulan	129.390.825	50
1	05	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	100%				100%	242.283.000	100%	156.581.700	100%	156.581.700	100%	281.104.500	57%	437.686.200	14
1	05	01	2	09	01	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	19 Unit				19 unit	70.205.000	19 unit	34.191.000	19 unit	34.191.000	19 Unit	64.050.000	27 Unit	98.241.000	42
1	05	01	2	09	02	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	8 Unit				8 unit	132.260.000	8 unit	95.650.700	8 unit	95.650.700	8 Unit	107.622.500	12 Unit	203.273.200	50
1	05	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17 Unit				17 unit	9.950.000	17 unit	7.815.000	17 unit	7.815.000	17 Unit	79.440.000	20 Unit	87.255.000	17
1	05	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 Paket				1 paket	29.868.000	1 paket	18.925.000	1 paket	18.925.000	1 Paket	29.992.000	1 paket	48.917.000	0
1	05	02				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	"Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%				100%		100%	462.534.800	100%	462.534.800	100%	493.741.000	56,5%	956.275.800	33
1	05	02	2	01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselesainya gangguan ketentraman dan ketertiban	100%				100%		100%	353.455.700	100%	353.455.700	100%	399.992.000	60%	753.447.700	29
1	05	02	2	01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	1. Jumlah Patroli yang dilaksanakan 2. Jumlah Pengumuman dan selebaran yang diedarkan 3. Jumlah Sosialisasi yang di laksanakan	1. 33 Kali 2. 30 Kali 3. 36 Kali				1. 33 Kali 2. 30 Kali 3. 36 Kali	240.594.000	96 kali	219.081.800	96 kali	219.081.800	1. 33 Kali 2. 30 Kali 3. 36 Kali	242.342.000	1. 54 Kali 2. 53 Kali 3. 70 Kali	461.423.800	1. 72,7 2. 76,6 3. 94,4
1	05	02	2	01	02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1. Jumlah Razia yang dilaksanakan 2. Jumlah Kasus yang ditangani	190 Kali				190 kali	118.629.000	190 kali	102.302.250	190 kali	102.302.250	190 Kali	98.050.000	95 kali	200.352.250	50'
1	05	02	2	01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan	Jumlah Satlinmas Handal	436 Orang				436 orang	30.948.500	436 orang	30.721.650	436 orang	30.721.650	436 Orang	50.000.000	-	80.721.650	0

						Ketertiban Umum															
1	05	02	2	01	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kerjasama antar lembaga dan kemitraan	8 Kali			8 kali	9.600.000	8 kali	1.350.000	8 kali	1.350.000	8 Kali	9.600.000	12 kali	10.950.000	37,5
1	05	02	2	02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase pengawasan atas kepatuhan dan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah	100%			100%	163.546.000	75%	109.079.100	75%	109.079.100	100%	93.749.000	63,5%	202.828.100	52
1	05	02	2	02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Pelaksanaan Perda/Perbup yang di awasi	24 Kali			24 kali	88.731.000	24 kali	72.190.150	24 kali	72.190.150	24 Kali	75.161.000	26 kali	147.351.150	8,3
1	05	02	2	02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda/Perbup yang di tangani	50 kasus			50 kasus	74.815.000	50 kasus	36.888.950	50 kas us	36.888.950	50 kasus	18.588.000	145 kasus	55.476.950	190
1	05	04				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	"Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)"	15 menit			15 menit	790.061.600	15 menit	251.201.740	15 me nit	251.201.740	15 menit	362.979.000	15 menit	614.180.740	100
1	05	04	2	01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	100%			12 bulan	185.495.000	12 Bulan	232.084.290	12 Bul an	232.084.290	100%	232.988.000	87,5%	465.072.290	75
1	05	04	2	01	02	Pemadam dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Kejadian Kebakaran Yang Terselamatkan	35 kali			35 kali	185.495.000	35 kali	141.246.500	35 kali	141.246.500	35 kali	232.988.000	80 kali	374.234.500	128
1	05	04	2	02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	100%			100%	29.991.000	100%	19.117.450	100 %	19.117.450	100%	29.991.000	64%	49.108.450	0
1	05	04	2	02	01	Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Jumlah Pendataan Alat Pengamanan diri dari bahaya Kebakaran	1 Paket			1 paket	29.991.000	1 paket	19.117.450	1 pak et	19.117.450	1 Paket	29.991.000	1 paket	49.108.450	0
1	05	04	2	03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran yang terdata	100%									100%	29.950.000	3%	29.950.000	32
1	05	04	2	03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Kejadian Kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran yang terdata	100%									100%	29.950.000	3%	29.950.000	3
1	05	04	2	04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat	100%									100%	70.050.000	8%	70.050.000	8
1	05	04	2	04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat	24 kali									24 kali	70.050.000	2 kali	70.050.000	8,3

1	05	01	01	16		Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Terlayani penanganan dan pencegahan penyebaran pandemi covid-19					12 Bulan	574.575.600						12 Bulan	-	
1	05	01	01	16	14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana	Jumlah Penanganan Kasus yang dilaksanakan					116 Kali	574.575.600						116 Kali	-	

Simpang Empat, Juli 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran



HENDRI WIJAYA,SH

NIP. 19711210 199203 1 001

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran tidak ada realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun 2021.

2.1.2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Tabel 2.1.2

NO	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	87%	87%
2.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	"Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman dan keindahan)	100%	82%	82%
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	"Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)"	100%	81%	81%

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja/keluaran yang direncanakan pada Tahun 2021.

2.1.4. Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kas sehingga target kinerja tercapai dengan baik.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dengan adanya capaian Program Renstra Perangkat Daerah maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terencana dan teranggarakan, sehingga tata kelola pemerintahan bisa tercapai dengan baik.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur dalam hal Perencanaan, penganggaran baik staf yang menangani serta para pejabat, sehingga capaian target kinerja program/kegiatan lebih optimal.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja program dan kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan indikator kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

2. Capaian analisis kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan diantaranya untuk program/kegiatan dan pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 yang telah disepakati.

Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentu posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 2.2.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Adapun indicator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.2.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Sasaran	Indikator Utama	Target	Realisasi	% Realisasi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Kebakaran	Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laoran keuangan Satpolpp dan Kebakaran	50%	-	Belum dilakukan penilaian
	Nilai SAKIP	B	-	Belum dilakukan penilaian
	Level Maturitas SPIP	2,11	3,19	
Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	80%	151 %	188%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di Daerah	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit	15 Menit	100%

Standar Pelayanan Minimal menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan dijabarkan dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018, dimana pencapaian target SPM 100% menjadi kinerja Kepala Daerah. Secara rinci akan dijelaskan tentang layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) SatpolPP dengan jenis pelayanan dasar dan indikator pencapaiannya antara lain:

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti
 - Jumlah Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil;
 - Jumlah Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan.
2. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu
 - Jumlah penegakan Perda;
 - Jumlah pelaksanaan penegakan Perda sesuai SDM Pol PP;
 - Jumlah pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras.
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
 - Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak;
 - Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) SatpolPP dan Kebakaran yang harus dipenuhi adalah:

- A. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
 1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
 2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
- B. Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)
 1. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
 2. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran

Tabel 2.2.3 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja SatpolPP dan Kebakaran
Kabupaten Pasamann Barat

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laoran keuangan Satpolpp dan Kebakaran	-	-	50%	75%	75%	100%	-	-	75%	100%	Hasil penilaian tahun 2021 belum ada
	Nilai SAKIP	-	-	2,11	2,35	2,48	2,6	-	-	2,48	2,6	Hasil penilaian tahun 2021 belum ada
	Level Maturitas SPIP	-	-	B	B	B	BB	-	-	B	BB	Hasil penilaian tahun 2021 belum ada
2.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100%	100%	80%	84%	87%	99%	151%	-	100%	100%	
3.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	-	15 Menit	15 Menit	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum terkait dengan Kondisi geografis wilayah Kabupaten Pasaman Barat, serta jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat yang cenderung meningkat secara otomatis akan membawa dampak terhadap munculnya masalah- masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan kantrantibmas di wilayah Kabupaten Pasaman Barat mulai dari kebutuhan lahan pemukiman, penyakit masyarakat seperti Perjudian, Miras dan PSK, masalah sosial lain yang dilatar belakangi oleh ekonomi seperti banyaknya pedagang kaki lima (PKL), gelandangan dan pengemis (gepeng) serta aksi sosial terkait pro kontra terhadap kebijakan penda sampai dengan konflik berlatar belakang keagamaan menempatkan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran adalah bagian perangkat daerah dalam posisi yang cukup penting sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 yaitu Satuan Perangkat Daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dalam rangka menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tertib terkait dengan berbagai gambaran kondisi diatas maka diperlukan suatu komitmen dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD dan seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan bidangnya masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku serta dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal setempat. Namun secara garis besar beberapa permasalahan yang menjadi issue penting dalam penegakan hukum dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban adalah :

1. Pelayanan penegak hukum masih dirasakan kurang, baik dari sisi jumlah, kualitas, kecepatan, ketegasan maupun pemerataan pelayanan hukum;
2. Kurangnya Tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
3. Masih tingginya kasus pelanggaran Perda oleh masyarakat;
4. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
5. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.

Untuk itu rekomendasi strategis yang dapat disampaikan dalam rangka meminimalisir permasalahan tersebut antara lain :

1. Aspek regulasi, yaitu penguatan terhadap kapasitas kelembagaan maupun peraturan perundang-undangan baik tingkat kabupaten maupun kecamatan.

2. Aspek sumber daya manusia dalam hal ini jumlah personil serta kualitas aparatur.
3. Aspek sarana dan prasarana yaitu terkait dengan kelengkapan aparatur maupun kebutuhan sarana dan prasarana pendukung lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas.
4. Aspek Pembiayaan yaitu terkait dengan anggaran pendukung operasional kegiatan maupun peningkatan kesejahteraan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 diarahkan untuk melanjutkan sebagaimana tahun 2021. Arah kebijakan pembangunan tahun 2022 masih sejalan dengan visi dan misi daerah, ditujukan untuk mewujudkan Pasaman Barat yang beriman, cerdas, sehat, bermartabat, sejahtera dan berwawasan lingkungan. Sasaran Prioritas pada renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yakni Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan pada Sasaran Prioritas yang telah ditetapkan didalam RKPD, yaitu :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
2. Meningkatnya penegakan perda, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.

Tabel 2.4.1 (T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
Kabupaten Pasaman Barat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				9.999.918.353	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				9.999.918.353	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8.668.927.353	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8.668.927.353	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan gaji, tunjangan dan honorarium ASN	100 %	6.076.494.311	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan gaji, tunjangan dan honorarium ASN	100 %	6.076.494.311	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	3.793.054.311	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	3.793.054.311	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2.157.500.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2.157.500.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	125.940.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	125.940.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100 %	115.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100 %	115.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	35.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	35.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	30.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	20.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	20.000.000	

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	30.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	30.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor	100 %	260.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor	100 %	260.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	150.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan sarana prasarana serta peralatan	100 %	1.860.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan sarana prasarana serta peralatan	100 %	1.860.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	35.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	35.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.700.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.700.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	10.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	10.000.000	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	15.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	15.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100 %	115.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100 %	115.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan 12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	75.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	100 %	242.433.042	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	100 %	242.433.042	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	80.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	80.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	100.000.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	30.840.865	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	30.840.865	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	29.592.177	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	29.592.177	
2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		"Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)"	87 %	800.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		"Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)"	87 %	800.000.000	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terselesaikannya gangguan ketentraman dan ketertiban	100 %	515.000.000	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terselesaikannya gangguan ketentraman dan ketertiban	100 %	515.000.000	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	99 Kasus	350.000.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	99 Kasus	350.000.000	
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	190 Kasus	60.000.000	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	190 Kasus	60.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5.000.000	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman	19 Dokumen	60.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman	19 Dokumen	60.000.000	

	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Pasaman Barat	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	436 Orang	5.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Pasaman Barat	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	436 Orang	5.000.000	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	8 Dokumen	20.000.000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	8 Dokumen	20.000.000	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	5 Unit	5.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	5 Unit	5.000.000	
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	5 Dokumen	5.000.000	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	5 Dokumen	5.000.000	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	5.000.000	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	5.000.000	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase pengawasan atas kepatuhssn dan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah	100 %	235.000.000	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase pengawasan atas kepatuhssn dan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah	100 %	235.000.000	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	4 Laporan	20.000.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	4 Laporan	20.000.000	
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24 Laporan	95.000.000	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24 Laporan	95.000.000	

	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	50 Laporan	120.000.000	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	50 Laporan	120.000.000	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Persentase PNS yang mengikuti pelatihan PPNS	100 %	50.000.000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Persentase PNS yang mengikuti pelatihan PPNS	100 %	50.000.000	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	50.000.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	50.000.000	
3.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)"	15 Menit	530.991.000	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)"	15 Menit	530.991.000	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase tercapainya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya	100 %	401.000.000	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase tercapainya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya	100 %	401.000.000	
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggula Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	30 Dokumen	15.000.000	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggula Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	30 Dokumen	15.000.000	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	35 Laporan	230.000.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	35 Laporan	230.000.000	
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakua si Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	24 Dokumen	16.000.000	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	24 Dokumen	16.000.000	

	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	15.000.000	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	15.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	50 Unit	60.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	50 Unit	60.000.000	
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	20 Orang	20.000.000	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	20 Orang	20.000.000	
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	19 Desa/Kelurahan	15.000.000	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	19 Desa/Kelurahan	15.000.000	
	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	15 Dokumen	30.000.000	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	15 Dokumen	30.000.000	
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Persentase pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	100 %	29.991.000	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Persentase pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	100 %	29.991.000	

	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	11 Dokumen	29.991.000	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	11 Dokumen	29.991.000	
	Investigasi Kejadian Kebakaran		Persentase kejadian kebakaran yang terdata	100 %	29.950.000	Investigasi Kejadian Kebakaran		Persentase kejadian kebakaran yang terdata	100 %	29.950.000	
	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian Jumlah sosialisasi dan edukasi masyarakat yang dilakukan	30 Dokumen 24 kali	29.950.000 70.050.000	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian Jumlah sosialisasi dan edukasi masyarakat yang dilakukan	30 Dokumen 24 kali	29.950.000 70.050.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	133 Orang	70.050.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	133 Orang	70.050.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat menghimpun seluruh usulan dan masukan kegiatan dari Perangkat Daerah yang menyangkut peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur baik bersifat teknis, fungsional maupun penjejangan karier.

Program/kegiatan yang diusulkan tersebut dilakukan kajian baik kesesuaian dengan isu-isu penting dan kebutuhan Pemerintah Daerah maupun tugas pokok yang melekat pada Perangkat Daerah bersangkutan terkait pencapaian target jangka pendek dan menengah pembangunan daerah. Penelaahan lebih lanjut atas usulan kegiatan dimaksud, dilakukan penyelarasan dengan kebijakan tingkat nasional dan regional provinsi yang menjadi fokus bagi daerah guna memperoleh tingkat prioritas kegiatan yang hendak diusulkan akan dilaksanakan pada rencana kerja tahun bersangkutan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat belum dapat menelaah usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara langsung, mengingat sasaran dari program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat adalah Pegawai ASN.

Tabel 2.5.1
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		N I H I L			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMD tahun 2020-2024, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
- b. Pembangunan Infrastruktur;
- c. Penyederhanaan Regulasi;
- d. Penyederhanaan Birokrasi; dan
- e. Transformasi Ekonomi.

Terdapat 7 agenda pembangunan dalam pelaksanaan lima arahan utama presiden yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara melalui:

- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
- 3) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri pertahanan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai satuan kerja yang melaksanakan urusan wajib pemerintah daerah dibidang penegakan Perda/Perkada, penyelenggara ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang telah dituangkan dalam dokumen rencana strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

Pernyataan Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026 adalah : ***“Mewujudkan masyarakat yang tertib hukum, tertib sosial dan tertib lingkungan yang maju, bermartabat dan sejahtera”***.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka dirumuskan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya aparatur yang profesional dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat;
2. Mewujudkan penegakan peraturan daerah terhadap masyarakat yang taat dan sadar hukum;
3. Meningkatkan pelaksanaan keamanan dan kenyamanan lingkungan di tengah masyarakat;
4. Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka dirumuskan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kabupaten Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya aparatur yang profesional dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat;
2. Mewujudkan penegakan peraturan daerah terhadap masyarakat yang taat dan sadar hukum;
3. Meningkatkan pelaksanaan keamanan dan kenyamanan lingkungan di tengah masyarakat;
4. Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran.

Rancangan program dan kegiatan serta pendanaan yang menjadi prioritas sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026. Secara umum, rencana program dan kegiatan perubahan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 tertuang dalam 3 (Tiga) program yang terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan, berikut tabel rencana Program kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan table T-C.33, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.3.1 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
Kabupaten Pasaman Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				9.999.918.353				10.295.607.626
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	8.668.927.353			100%	8.789.616.626
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji, tunjangan dan honorarium ASN		100%	6.076.494.311			100%	6.134.183.584
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat	35 Orang/bulan	3.793.054.311	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 Orang/bulan	3.843.054.311
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat	12 Dokumen	2.157.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	2.162.500.000
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat	12 Dokumen	125.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	128.629.273
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian		100%	115.000.000			100%	130.000.000
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pasaman Barat	1 Paket	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	50.000.000
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pasaman Barat	2 Orang	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Orang	30.000.000
1	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat	35 Orang	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 Orang	20.000.000
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat	6 Orang	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Orang	30.000.000
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor		100%	260.000.000			100%	260.000.000
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat	1 Paket	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	15.000.000
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat	1 Paket	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	65.000.000
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat	1 Paket	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	10.000.000
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat	1 Paket	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	20.000.000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat	26 Laporan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		26 Laporan	150.000.000

1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan sarana prasarana serta peralatan		100%	1.860.000.000			100%	1.880.000.000
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat	2 Unit	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	40.000.000
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat	1 Unit	1.700.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	1.700.000.000
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat	4 Unit	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	10.000.000
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat	4 Unit	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	30.000.000
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat	1 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	100.000.000
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat	100%	115.000.000			100%	125.000.000
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat	12 Laporan	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	75.000.000
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat	12 Laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	20.000.000
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat	12 Laporan	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	30.000.000
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang terpelihara		100%	242.433.042			100%	260.433.042
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pasaman Barat	19 Unit	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19 Unit	80.000.000
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pasaman Barat	8 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Unit	100.000.000
1	05	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Pasaman Barat	2 Unit	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	2.000.000
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pasaman Barat	17 Unit	30.840.865	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 Unit	42.840.865
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pasaman Barat	6 Unit	29.592.177	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	35.592.177
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	"Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)"		87%	800.000.000			87%	960.000.000
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya gangguan ketentraman dan ketertiban		100%	515.000.000			100%	675.000.000
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Pasaman Barat	99 Kasus	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		99 Kasus	500.000.000
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kab. Pasaman Barat	190 Kasus	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		190 Kasus	65.000.000

1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	5 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	5.000.000
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman	Kab. Pasaman Barat	19 Dokumen	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19 Dokumen	65.000.000
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Pasaman Barat	436 Orang	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		436 Orang	5.000.000
1	05	02	2.01	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kab. Pasaman Barat	8 Dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Dokumen	20.000.000
1	05	02	2.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kab. Pasaman Barat	5 Unit	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	5.000.000
1	05	02	2.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Kab. Pasaman Barat	5 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	5.000.000
1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kab. Pasaman Barat	2 Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	5.000.000
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pengawasan atas kepatuhssn dan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah		100%	235.000.000			100%	235.000.000
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Kab. Pasaman Barat	4 Laporan	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	20.000.000
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Pasaman Barat	24 Laporan	95.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Laporan	95.000.000
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kab. Pasaman Barat	50 Laporan	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Laporan	120.000.000
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PNS yang mengikuti pelatihan PPNS		100%	50.000.000			100%	50.000.000
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Kab. Pasaman Barat	1 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	50.000.000
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)"		15 Menit	530.991.000			15 Menit	545.991.000
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya		100%	401.000.000			100%	416.000.000
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggula Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Kab. Pasaman Barat	30 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Dokumen	20.000.000

1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	35 Laporan	230.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 Laporan	240.000.000
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Pasaman Barat	24 Dokumen	16.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Dokumen	16.000.000
1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	20 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Dokumen	15.000.000
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kab. Pasaman Barat	50 Unit	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Unit	60.000.000
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Kab. Pasaman Barat	20 Orang	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Orang	20.000.000
1	05	04	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKI-K)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKI-K) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Kab. Pasaman Barat	19 Desa/Kelura	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19 Desa/Keluraha n	15.000.000
1	05	04	2.01	09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Pasaman Barat	15 Dokumen	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Dokumen	30.000.000
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran		100%	29.991.000			100%	29.991.000
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Kab. Pasaman Barat	11 Dokumen	29.991.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Dokumen	29.991.000
1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang terdata		100%	29.950.000			100%	29.950.000
1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Kab. Pasaman Barat	30 Dokumen	29.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Dokumen	29.950.000
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah sosialisasi dan edukasi masyarakat yang dilakukan		24 kali	70.050.000			24 kali	70.050.000
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Kab. Pasaman Barat	133 Orang	70.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		133 Orang	70.050.000
TOTAL									9.999.918.353				10.295.607.626

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program yang direncanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2022 terdiri atas 3 program dengan 3 capaian program sebagai berikut :

Tabel 4.1

No.	Program	Capaian Program	Pagu Indikatif (Rp)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	8.668.927.353
2.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, da keindahan)	800.000.000
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	530.991.000
	Jumlah		9.999.918.353

Anggaran/pagu indikatif yang diperkirakan dalam APBD Perubahan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 dan sumber lainnya yang sah (APBN/APBD Propinsi Sumatera Barat/ Dekonsentari Tugas Perbantuan, Bantuan Luar Negeri, dan lain-lain) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar Rp. 9.999.918.353,- Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.2

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	%
1.	APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	9.999.918.353,-	100
2.	APBD Pemerintah Propinsi Sumatera Barat		
3.	APBN/ Dekonsentrasi		
4.	APBN/ Tugas Perbantuan		
5.	Bantuan Luar Negeri		
6.	Bantuan Masyarakat dan lain-lain		
	Jumlah	9.999.918.353,-	100

Kegiatan yang direncanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat pada perubahan tahun 2022 yaitu sebanyak 13 Kegiatan dengan 13 indikator keluaran serta 49 sub kegiatan dengan 49 indikator keluaran dan 49 indikator hasil. Rumusan Rencana Kerja kegiatan, indikator kegiatan dan pagu indikatif per indikator hasil untuk tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir.

Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
Kabupaten Pasaman Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Kodefikasi
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				9.999.918.353				10.295.607.626	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	8.668.927.353			100%	8.789.616.626	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji, tunjangan dan honorarium ASN		100%	6.076.494.311			100%	6.134.183.584	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat	35 Orang/bulan	3.793.054.311	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 Orang/bulan	3.843.054.311	
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat	12 Dokumen	2.157.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	2.162.500.000	
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat	12 Dokumen	125.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	128.629.273	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian		100%	115.000.000			100%	130.000.000	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pasaman Barat	1 Paket	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	50.000.000	
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pasaman Barat	2 Orang	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Orang	30.000.000	

1	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat	35 Orang	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 Orang	20.000.000	
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat	6 Orang	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Orang	30.000.000	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor		100%	260.000.000			100%	260.000.000	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat	1 Paket	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	15.000.000	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat	1 Paket	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	65.000.000	
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat	1 Paket	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	10.000.000	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat	1 Paket	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	20.000.000	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat	26 Laporan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		26 Laporan	150.000.000	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan sarana prasarana serta peralatan		100%	1.860.000.000			100%	1.880.000.000	
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat	2 Unit	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	40.000.000	
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat	1 Unit	1.700.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	1.700.000.000	
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat	4 Unit	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	10.000.000	

1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat	4 Unit	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	30.000.000	
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat	1 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	100.000.000	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat	100%	115.000.000			100%	125.000.000	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat	12 Laporan	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	75.000.000	
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat	12 Laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	20.000.000	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pasaman Barat	12 Laporan	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	30.000.000	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang terpelihara		100%	242.433.042			100%	260.433.042	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pasaman Barat	19 Unit	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19 Unit	80.000.000	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pasaman Barat	8 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Unit	100.000.000	
1	05	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Pasaman Barat	2 Unit	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	2.000.000	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pasaman Barat	17 Unit	30.840.865	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 Unit	42.840.865	
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pasaman Barat	6 Unit	29.592.177	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	35.592.177	

1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	"Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)"		87%	800.000.000			87%	960.000.000	1.01
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya gangguan ketentraman dan ketertiban		100%	515.000.000			100%	675.000.000	1.01
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Pasaman Barat	99 Kasus	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		99 Kasus	500.000.000	1.01
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kab. Pasaman Barat	190 Kasus	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		190 Kasus	65.000.000	1.01
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	5 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	5.000.000	1.01
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman	Kab. Pasaman Barat	19 Dokumen	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19 Dokumen	65.000.000	1.01
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Pasaman Barat	436 Orang	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		436 Orang	5.000.000	1.01
1	05	02	2.01	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kab. Pasaman Barat	8 Dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Dokumen	20.000.000	1.01
1	05	02	2.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kab. Pasaman Barat	5 Unit	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	5.000.000	1.01
1	05	02	2.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Kab. Pasaman Barat	5 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	5.000.000	1.01
1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kab. Pasaman Barat	2 Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		2 Laporan	5.000.000	1.01

										Umum				
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pengawasan atas kepatuhssn dan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah		100%	235.000.000			100%	235.000.000	1.01
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Kab. Pasaman Barat	4 Laporan	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	20.000.000	1.01
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Pasaman Barat	24 Laporan	95.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Laporan	95.000.000	1.01
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kab. Pasaman Barat	50 Laporan	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Laporan	120.000.000	1.01
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PNS yang mengikuti pelatihan PPNS		100%	50.000.000			100%	50.000.000	1.01
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Kab. Pasaman Barat	1 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	50.000.000	1.01
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)"		15 Menit	530.991.000			15 Menit	545.991.000	1.01
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya		100%	401.000.000			100%	416.000.000	1.01
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggula Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Kab. Pasaman Barat	30 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Dokumen	20.000.000	1.01
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	35 Laporan	230.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 Laporan	240.000.000	1.01

1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Pasaman Barat	24 Dokumen	16.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Dokumen	16.000.000	1.01
1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	20 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Dokumen	15.000.000	1.01
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kab. Pasaman Barat	50 Unit	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Unit	60.000.000	1.01
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Kab. Pasaman Barat	20 Orang	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Orang	20.000.000	1.01
1	05	04	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Kab. Pasaman Barat	19 Desa/Kelurahan	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19 Desa/Kelurahan	15.000.000	1.01
1	05	04	2.01	09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Pasaman Barat	15 Dokumen	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Dokumen	30.000.000	1.01
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran		100%	29.991.000			100%	29.991.000	1.01
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Kab. Pasaman Barat	11 Dokumen	29.991.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Dokumen	29.991.000	1.01
1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang terdata		100%	29.950.000			100%	29.950.000	1.01
1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Kab. Pasaman Barat	30 Dokumen	29.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Dokumen	29.950.000	1.01

1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah sosialisasi dan edukasi masyarakat yang dilakukan		24 kali	70.050.000			24 kali	70.050.000	1.01
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Kab. Pasaman Barat	133 Orang	70.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		133 Orang	70.050.000	1.01
TOTAL									9.999.918.353				10.295.607.626	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 yang merupakan penjabaran visi, misi, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yang berpedoman kepada Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat dengan tidak mengesampingkan data/masukan/ rekomendasi dari berbagai pihak.

Rencana kerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai program dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai program-program yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.

Pada tahap pelaksanaan masih banyak ditemui permasalahan yang mengakibatkan tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran disebabkan beberapa hambatan dengan pokok permasalahan yang berkaitan. Untuk ke depan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran akan berupaya meningkatkan pencapaian target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran ini akan menjadi tolok ukur dan dipahami oleh seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sehingga akan memiliki kesamaan pandang dalam mencapai tujuan dengan harapan realisasi capaian kinerja dapat tercapai sesuai sesuai target yang telah ditetapkan dan dapat terlaksana dengan baik.

Simpang Empat, Juli 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran



HENDRI WIJAYA,SH

NIP. 19711210 199203 1 001